

Efektivitas Uji Berkala Armada Bus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

Sakbir

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Corresponding Author: Sakbir, E-Mail: sakbirrinduaruna@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan uji berkala armada bus oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan uji berkala armada bus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato belum efektif. Hal ini terlihat dari ketiga indikator yang diukur, dimana terdapat dua indikator yang belum optimal yakni indikator pendekatan sumber dan indikator pendekatan sasaran. Hal ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana maupun jumlah petugas yang mendukung proses uji berkala kendaraan armada bus sehingga sasaran atau tujuan diadakannya uji berkala belum tercapai. Sementara satu indikator sudah dianggap optimal yakni indikator pendekatan proses, hal ini terlihat dari kesungguhan para petugas di dalam melakukan uji berkala armada bus baik dikantor maupun pada saat melakukan operasi di jalan raya.

Kata Kunci: Efektivitas Uji Berkala

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the extent to which the implementation of periodic testing of the bus fleet by the Technical Implementation Unit of the Pohuwato Regency Transportation Service. The research method used a qualitative type. The results of the study showed that the periodic testing of the bus fleet by the Technical Implementation Unit (UPTD) of the Pohuwato Regency Transportation Service was not yet effective. This can be seen from the three indicators measured, where there are two indicators that are not yet optimal, namely the source approach indicator and the target approach indicator. This can be seen from the lack of facilities and infrastructure as well as the number of officers who support the periodic testing process of the bus fleet so that the target or purpose of holding the periodic test has not been achieved. While one indicator is considered optimal, namely the process approach indicator, this can be seen from the seriousness of the officers in conducting periodic testing of the bus fleet both in the office and when operating on the highway.

Keywords: Periodic Test Effectiveness

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam keberlangsungan ekonomi Indonesia transportasi menjadi sarana penting di dalamnya. Secara umum di mata masyarakat. (Moestikahadi 2000;14) Transportasi adalah sarana kegiatan berpindah tempat terhadap manusia atau barang dengan tujuan tertentu dan menggunakan sarana tertentu yaitu kendaraan. Transportasi dalam era modern telah berubah menjadi kebutuhan masyarakat di era modern dengan kebutuhan dan tuntutan yang semakin modern ragamnya. Transportasi di Indonesia yang semakin tumbuh dan berkembang baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor pendukung kemajuan dan pengembangan wilayah sebagai bagian dari rencana pembangunan Negara. Indonesia dengan banyak

sumber daya alam yang harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, tentunya memerlukan fasilitas transportasi sebagai distribusi yang merupakan bagian dari proses ekonomi lainnya yaitu produksi, dan konsumsi.

Permasalahan transportasi publik di Indonesia masih menjadi permasalahan klasik diseluruh daerah di penjuru negeri Indonesia. Kecelakaan lalu lintas, pembagian jalur dan ketertiban penyelenggara transportasi menjadi penyumbang masalah terbesar dalam permasalahan transportasi. Selain itu fenomena pertumbuhan jumlah ruas jalan yang tidak seimbang dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mampu menyebabkan salah satu penyakit masyarakat yang sering disebut “macet”. Permasalahan akut ini sepertinya sudah menjadi selayaknya tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha penyedia kendaraan. Pabrik penyedia kendaraan bermotor disinyalir juga menjadi akar munculnya kemacetan karena tidak terbenturnya pabrik produsen kendaraan bermotor terhadap tata kelola niaga yang seharusnya diselenggarakan dan ditaati oleh para produsen kendaraan bermotor.

Banyaknya angka kecelakaan lalu lintas mungkin juga berbanding lurus dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di jalanan Indonesia. Kecelakaan lalu lintas menurut data Penyebab Kecelakaan dari Korlantas Polri 2018, pada umumnya terdapat 3 (tiga) penyebab utama yaitu *Human Error* (kesalahan pada faktor manusia sebagai operator atau *user*), *malfunction vehicle* (kesalahan pada faktor kendaraan) dan faktor prasarana jalan (infrastruktur). Kecelakaan Lalu Lintas perlu menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengelola kebijakan khususnya bidang transportasi agar mampu tercipta lebih baik dalam pelaksanaannya.

Dalam mengantisipasi hal ini, Pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara negara memiliki regulasi dan peraturan tentang tata kelola transportasi umum khususnya angkutan darat demi terhindar dari permasalahan transportasi yaitu kecelakaan lalu lintas. Tujuannya adalah untuk mengatur dan memberikan ijin operasional kepada penyelenggara transportasi baik secara individu maupun kelompok pelaku usaha jasa transportasi secara ketat, terstruktur dan berkesinambungan.

Kasus kecelakaan yang melibatkan mobil bus pada interval bulan Januari- Februari 2019 di Indonesia menimbulkan korban jiwa sebanyak 110 orang. Data yang ada di atas merupakan data yang diperoleh dari pemberitaan media massa, sehingga mungkin masih banyak kasus terjadi karena luput dari pemberitaan media massa. Kecelakaan yang terjadi di Boyolali dan Ungaran dengan jumlah korban masing-masing 5 dan 22 korban jiwa tergolong fatal dikarenakan jenis kendaraan yang terlibat adalah minibus dengan kapasitas 8-25 orang.

Dilihat berdasarkan jumlah kapasitas kendaraan dan timbulnya korban, mengisyaratkan bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan yang sangat fatal. Penekanan akan terjadinya peristiwa kecelakaan dapat dilakukan apabila pemerintah dalam menerapkan kebijakan bidang transportasi mampu menjalankan secara maksimal dan tegas bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu regulasi diperlukan baik

dalam bentuk Peraturan Menteri, Undang-Undang dan sebagainya yang sesuai dengan hukum. Dalam proses pengaturan regulasi transportasi, para pengguna transportasi individu, angkutan barang dan angkutan orang diwajibkan memiliki dokumen lengkap mengenai kendaraan sebagai bukti sah kelayakan jalan suatu kendaraan angkutan (KIR/*keur*) yang diterbitkan oleh institusi tertentu yaitu Dinas Perhubungan. Kelayakan jalan suatu kendaraan angkutan (KIR/*keur*) diselenggarakan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 10 Tahun 1988 Pasal 1 tanggal terbit 26 Februari 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi Keputusan Menteri nomor 10 Tahun 1988 Pasal 1 yang tercantum di atas, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan angkutan jalan, diperlukan kepengurusan transportasi yang diantaranya adalah kelayakan jalan kendaraan bermotor (KIR/*keur*) dan tarif retribusi kendaraan bermotor yang berbentuk pajak maupun non pajak.

Keputusan Menteri Nomor 10 tahun 1988 juga menjadi acuan dalam terbentuknya undang-undang berikutnya. Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 dan Undang – Undang 22 Tahun 2009 merupakan sebuah kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebagai kebutuhan dan penyesuaian terhadap kemajuan transportasi publik dalam era modern.

Perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam bidang transportasi digunakan sebagai acuan akan sebuah perlindungan konsumen transportasi baik angkutan barang maupun angkutan orang. Komponen yang diatur mengenai penyelenggaraan transportasi seperti standar teknis kendaraan dan keselamatan transportasi diatur berkesinambungan dengan aspek lainnya. Kebijakan uji berkala kendaraan bermotor secara hukum diatur dalam perundang-undangan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, Keputusan Menteri nomor 35 Tahun 2003. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan nomor SK.1131/AJ.003/DRJD/2003 telah mengacu pada Keputusan Menteri nomor 10 Tahun 1988, di mana dalam Surat Keputusan mengatur tentang standar pelayanan teknis mobil bus umum dari segi kelas pelayanan dan standar keselamatan.

Mobil Bus merupakan jenis mobil yang banyak digunakan sebagai angkutan umum atau barang. Hal ini dikarenakan kapasitasnya yang bisa memuat orang atau barang dengan jumlah yang cukup banyak. Selain memiliki kelebihan dari segi muatan, mobil bus juga memiliki resiko yang lebih tinggi dari kendaraan lainnya jika terjadi kecelakaan. Dengan muatan orang yang lebih banyak , sudah tentu akan menimbulkan potensi kerugian yang lebih banyak pula. Olehnya itu, perlu kiranya para pemilik usaha angkutan bus untuk setia melakukan uji kelayakan kendaraan sebagaimana regulasi yang ada. Hingga saat ini, disinyalir masih banyak kendaraan jenis bus yang tidak melakukan uji kelayakan kendaraan sehingga tidak memiliki jaminan hukum untuk beroperasi dan mengancam keselamatan banyak orang. Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. dimana data menunjukkan bahwa populasi mobil jenis bus cukup banyak, sementara yang sudah melakukan uji berkala tidak sesuai dengan jumlah populasi yang ada.

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam

rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan diopersikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Faktanya bahwa masih banyak bus ataupun kendaraan lain yang tidak patuh pada peraturan tersebut. Banyak bus yang tidak setia melakukan uji berkala dalam waktu 6 (enam) bulan sekali, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Pada saat operasi digelar oleh petugas dan ditemukan pelanggaran terhadap uji berkala, barulah para supir atau pemilik bus mengaku bersalah dan siap untuk melakukan uji berkala, meski ada juga yang lolos dari hal tersebut dikarenakan adanya oknum-oknum yang nakal pada saat menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, keberadaan petugas penguji dalam hal ini PPNS baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas kurang memadai. Idealnya, jumlah petugas penguji adalah sebanyak 12 orang, namun kenyataannya dilapangan hanya 3 orang saja sehingga tidak sebanding dengan jumlah atau volume kendaraan yang harus diuji kelayakannya. Kemampuan teknis penguji kendaraan masih rendah sehingga dalam proses pemeriksaan uji berkala akan memakan waktu yang lama. Selain itu penguji atau PPNS yang bertugas melakukan uji berkala minim keterampilan teknis yang dikarenakan kurangnya kesempatan tenaga kerja teknis untuk mengikuti pendidikan atau bimtek, dan kurang tegasnya sanksi dari petugas untuk memberikan sanksi terhadap pemilik kendaraan. Semuanya itu sangatlah berpengaruh dalam kinerja dan hasil dilapangan.

Penelitian tentang uji berkala kendaraan pernah dilakukan sebelumnya oleh Rosi Damayanti dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) terkait dengan Keselamatan Penumpang (Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar secara garis besar di tinjau dari segi teknis telah mampu membentuk perlindungan terhadap keselamatan penumpang. Akan tetapi, keselamatan Penumpang tidak hanya ditentukan oleh kelayakan teknis kendaraan bermotor saja, tetapi konsumen atau penumpang harus memperoleh kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan alat angkutan, segi pengemudi, dan kondisi jalannya juga berpengaruh. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang perlu dibenahi dalam hal pemeriksaan (pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau yang dikenal dengan nama uji petik laik jalan atau inspeksi terhadap angkutan umum yang belum maksimal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam artikel ini, penulis menggunakan teori Martani dan Lubis untuk mengukur sejauhmana efektivitas Uji Berkala Armada Bus oleh Dinas (UPTD)

Perhubungan Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan tiga indikator besar yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas Uji Berkala Armada Bus oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013:9). Oleh karena itu peneliti lebih menekankan pada metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian berupa studi kasus, yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen tersebut diteliti, kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk data-data yang diteliti saja. Jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, nilai nominal, atau bilangan tetapi berupa struktur organisasi, sejarah, visi dan misi serta job diskripsi instansi (Marzuki, 2012)

Dengan melihat penggunaan pendekatan dan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka adapun kehadiran peneliti yaitu sebagai instrumen utama yang harus berbaur dengan lingkungan penelitian. Dalam hal ini, peneliti langsung menelaah dan menganalisa sumber data terkait dengan permasalahan penelitian sehingga hasil penyusunan penelitian nantinya akan menjadi akurat. Kehadiran peneliti sendiri dilokasi penelitian diawali dengan melakukan rancangan penelitian dan melakukan pemilihan lokasi sebagai objek sebagai lokus yang memiliki permasalahan.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji berkala kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan uji kir merupakan rangkaian kegiatan menguji, memeriksa komponen kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap prosedur serta persyaratan tekni layak jalan. Terdapat tiga sasaran utama dari diberlakukannya pengujian berkala kendaraan bermotor khususnya armada bus atau kendaraan penumpang. Pertama yaitu untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pemilik dan pengguna kendaraan atau angkutan umum. Kedua adalah dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan dari pencemaran polusi. Dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut adalah untuk melakukan uji kendaraan angkutan umum sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya.

Berikut adalah uraian pembahasan terkait dengan efektivitas Uji Berkala Armada Bus oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teori efektivitas (Martani dan Lubis (1987:55) dengan 3 pendekatan yaitu; Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Sasaran.

Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya

Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, sebuah organisasi memerlukan sumber daya sebagai penunjang yang mendukung terwujudnya tujuan yang diinginkan. Jika kita telaah lebih dalam lagi, dapat dikatakan bahwa sumber daya sangat berperan penting dalam aktifitas suatu organisasi. Organisasi tidak akan mampu berdiri tanpa adanya sumber daya, karena sumber dayalah yang menjalankan proses aktifitas yang telah direncanakan. Sumber daya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sebuah organisasi, pemenuhan ini meliputi segala aspek didalam ruang lingkup organisasi, baik organisasi formal maupun informal. Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki sumber daya yang baik, secara kuantitas maupun kualitas. Sumber daya adalah sesuatu yang bernilai dan memiliki manfaat atas penggunaannya terhadap kelangsungan hidup maupun pencapaian dari satu tujuan tertentu. Sumber daya dapat berupa fisik atau (materil) maupun non fisik (energi). Sumber daya merupakan Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati dan nonhayati, dan sumber daya buatan (Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1982).

Sumber daya merupakan objek sekaligus subyek. Oleh karena itu perencanaan sumber daya yang matang dan cermat sesuai dengan kebutuhan akan membantu pencapaian sasaran tujuan secara maksimal, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Pengelolaan sebuah organisasi tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset organisasi tersebut.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pendekatan sumber adalah suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan input organisasi untuk mengukur tingkat efektivitas Uji Berkala Armada Bus oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa, indikator pendekatan sumber untuk melakukan Uji Berkala Armada Bus oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato belum efektif. Hal tersebut terlihat dari kondisi sarana dan prasarana yang tidak lagi bekerja secara optimal serta minimnya jumlah petugas yang melakukan pengujian kendaraan.

Pendekatan Proses

Pendekatan proses atau process approach merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal maupun mekanisme

organisasi. Pendekatan proses pada Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato ini untuk memberikan pelayanan secara optimal terhadap masyarakat khususnya para pemilik kendaraan armada bus.

Pendekatan ini menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memerhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pendekatan proses (*process approach*) adalah pendekatan yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan organisasi untuk mengukur tingkat efektivitas uji berkala Armada Bus oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa, indikator pendekatan proses untuk melakukan Uji Berkala Armada Bus oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato sudah efektif. Hal tersebut terlihat dari kegiatan rutin Unit Pelaksana Teknis yang terus melakukan uji kelayakan kendaraan armada bus baik dikantor maupun turun langsung ke jalan dengan menggelar operasi rutin.

Pendekatan Sasaran

Efektivitas akan menjadi lebih jelas apabila memiliki arah dan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Penerapan makna efektivitas untuk organisasi berarti tercapainya sasaran organisasi sesuai dengan yang telah diterapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurut Siagian (1985:33-35), mengemukakan bahwa ukuran untuk mengetahui efektivitas suatu organisasi mencakup tentang “kejelasan sasaran yang hendak dicapai, adanya tujuan yang jelas dan pasti yang telah ditetapkan dalam mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai”. Pendekatan sasaran mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran tersebut.

Pendekatan sasaran mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memerhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

Adapun pendekatan sasaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menilai tujuan atau hasil untuk mengukur tingkat efektivitas Uji Berkala Armada Bus oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa indikator pendekatan sasaran untuk melakukan Uji Berkala Armada Bus oleh Unit Pelaksana Teknis Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya unit armada bus yang tidak meakukan uji berkala atau uji kir namun tetap beroperasi di jalan raya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa uji berkala armada bus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato belum efektif. Hal ini terlihat dari ketiga indikator yang diukur, dimana terdapat dua indikator yang belum optimal yakni indikator pendekatan sumber dan indikator pendekatan sasaran. Hal ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana maupun jumlah petugas yang mendukung proses uji berkala kendaraan armada bus sehingga sasaran atau tujuan diadakannya uji berkala belum tercapai. Sementara satu indikator sudah dianggap optimal yakni indikator pendekatan proses, hal ini terlihat dari kesungguhan para petugas di dalam melakukan uji berkala armada bus baik dikantor maupun pada saat melakukan operasi di jalan raya.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang peneliti tawarkan sebagai bahan pertimbangan;

1. Perlunya pihak pemerintah atau Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai
2. Perlunya pihak pemerintah atau Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan penambahan jumlah petugas penguji kendaraan.
3. Perlunya pihak pemerintah atau Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kerja dengan memaksimalkan uji berkala kendaraan

DAFTAR PUSTAKA

- Martani.H, Lubis.H. (1987). Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta
- Marzuki. (2012). Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Moestikahadi, S. (2000). “Pencemaran Udara”, Penerbit ITB, Bandung.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2009). Metodologi Penelitian Administrasi. Yogyakarta:BPFE.
- Siagian, P. (19851). Organisasi dan Prilaku Administrasi. Jakarta.Gunung Agung.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Tamin, Ofyar, Z. (2000). Perencanaan dan Permodelan Transportasi. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB